

**PENGARUH CHINA-SAUDI OIL DEAL AGREEMENT TERHADAP
HUBUNGAN BILATERAL ARAB SAUDI DAN AMERIKA SERIKAT**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Disusun oleh:

SYARIFAH NABILA AZZAHYAN

E061201053

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2025

**PENGARUH CHINA-SAUDI OIL DEAL AGREEMENT TERHADAP
HUBUNGAN BILATERAL ARAB SAUDI DAN AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Disusun oleh:

SYARIFAH NABILA AZZAHYAN

E061201053

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENGARUH CHINA-SAUDI OIL DEAL AGREEMENT
TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL ARAB SAUDI DAN
AMERIKA SERIKAT

N A M A : SYARIFAH NABILA AZZAHYAN

N I M : E061201053

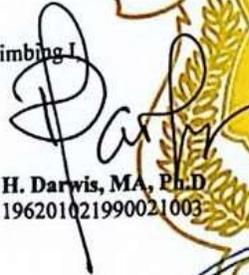
DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 11 Maret 2025



Pembimbing I,



Prof. H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,



Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR
NIP. 198909132024061001

Pt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. Dr. Emil Sukri, S.IP, M.Si.
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PENGARUH CHINA-SAUDI OIL DEAL AGREEMENT
TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL ARAB SAUDI DAN
AMERIKA SERIKAT

N A M A : SYARIFAH NABILA AZZAHYAN

N I M : E061201053

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 5 Maret 2025.



Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Dr. H. Adi Suryadi B, MA

3. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

[Handwritten signatures of Prof. H. Darwis, Atika Puspita Marzaman, Seniwati, Dr. H. Adi Suryadi B, and Abdul Razaq Z Cangara]

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Nabila Azzahyan
NIM : E061201053
Program Studi : S1
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul: **PENGARUH CHINA-SAUDI OIL DEAL AGREEMENT TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL ARAB SAUDI DAN AMERIKA SERIKAT** Merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Maret 2025



Syarifah Nabila Azzahyan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh China-Saudi Oil Deal Agreement Terhadap Hubungan Bilateral Arab Saudi dan Amerika Serikat**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis tentu saja mengalami banyak hambatan, namun berkat motivasi, kerja keras, serta dukungan dari orang-orang terdekat, penulis akhirnya mampu melalui hal tersebut. Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan sempurna tanpa kontribusi dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT** yang senantiasa memberi rahmat dan karunia-Nya kepada penulis,
2. Kedua Orang Tua penulis, Ayah **Syaifuddin Najmi** dan Ibu **Nurdiana Kr. Lebang** yang telah melahirkan dan memberikan dukungan kepada penulis. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT setiap saat. *I know I rarely said this but I love you from the bottom of my heart*, walaupun kita terpisah tapi Kakak selalu berdoa semoga Ayah dan Ibu bahagia di kehidupan masing-masing,

3. Kakek, Tante, dan Om penulis, **Prof. Dr. Ir. H. Nadjamuddin Harun, M.Si., Dr. Ir. Hj. Nurul Nadjmi, ST., MT.** dan **Ir. Amiruddin Najmi, ST., MT** selaku *role model* penulis. Terima kasih atas dukungan, arahan, doa, dan kasih sayang yang selama ini diberikan. *I hope I can make you proud,*
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, **Prof. H. Darwis, MA., Ph.D** yang sekaligus merupakan Dosen Pembimbing I serta Kak **Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR**, selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah memberi dorongan dan arahan, serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di departemen HI,
5. Terima kasih kepada dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin lainnya yaitu **Pak Patrice, Pak Munjin, Pak Ishaq, Pak Nasir, Pak Agus, Pak Aspi, Ibu Seni, Ibu Puspa, Ibu Isdah, Kak Atika, Kak Jannah, Kak Bama, Kak Gego, Kak Aswin, dan Kak Masyita.** Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dari awal penulis memulai perkuliahan hingga menjadi Sarjana.
6. Teruntuk teman-teman saya di Ilmu Hubungan Internasional, **Naufal, Anggun, Raffy, Nanda, Sabbe, Kasnur, Atha, Ayu, serta teman-teman ALTERA lainnya.** Terima kasih atas warna yang telah kalian

berikan selama perkuliahan. Penulis berharap kalian semua diberi kebahagiaan yang berlimpah oleh Allah SWT.

7. Teruntuk anak-anak **Paras Vol. 1, Kak Milan, Agus, Abdul, Kak Callia, Kak Cut, Farah, Fira, Liana, Ghina, Kak Maria, Kak Maryam, Kak Iwan, Makya, Anam.** Terima kasih telah mewarnai kehidupan penulis selama mengikuti volunteer di Lombok. Penulis harap kita masih bisa bertemu di lain kesempatan,
8. Teruntuk penghuni grup Whatsapp *Wanita Mahal*, **Ana, Rini, Kutel, Muli, Irma.** Terima kasih telah membersamai penulis sejak 2018 hingga saat ini, semoga janji-janji yang kita ucapkan terwujud satu per satu ya,
9. Cinta yang sebesar-besarnya kepada Tante penulis **Almh. Shinta Kr. Jai** yang pernah menjadi sosok ibu dan senantiasa memotivasi penulis untuk selalu memperbaiki diri. *I hope you're doing well, Ta. Your Bibol made it to Baruga. It's been a hell of a journey without you. I hope you longed for me as much as I did for you,*
10. Adik-adikku yang sangat-sangat penulis sayangi, **Sayyid Muhammad Ali Husain Khomaini, Syarifah Qhaerani Nurcahya, Sayyid Muh Charits Khairan Aisyah Salsabila Kiraniyah** yang selalu menjadi *reminder* bagi penulis untuk senantiasa bekerja keras dan menjadi contoh yang baik bagi kalian semua,
11. Teruntuk **Rady Alamsyah**, mantan sekaligus sahabat penulis, terima kasih atas *semua* hal yang telah diberikan. *You're such a pain in the ass*

wkwk but I'm grateful for all the memories that we've shared. Although we weren't what we used to be, but I'm glad that I can still call you my best friend. Semoga masih bisa akur ya seterusnya,

12. *Lastly, I wanna say thank you to myself. Thank you for all the hard work and the patience that you've put through. You made it through all the dramas with your sanity still intact. I may doubt the last part wkwk, but congrats girlie <3 I'm so effing proud of you, I hope you'll be kinder towards yourself in the future. Just keep swimming, okay? You got this bb, I love you so much.*

ABSTRAK

Syarifah Nabila Azzahyan. NIM E061201053. Pengaruh China Saudi Oil Deal Agreement Terhadap Hubungan Bilateral Arab Saudi dan Amerika Serikat. Pembimbing I Prof. H. Darwis, MA, Ph.D. Pembimbing II: Abdul Razaq Z Cangara, S.IP., M.Si., MIR. Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh merenggangnya hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat yang mendorong Arab Saudi untuk mendekati diri dengan Tiongkok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesepakatan minyak antara Tiongkok dan Arab Saudi terhadap hubungan bilateral Arab Saudi dan Amerika Serikat dan memahami bagaimana perkembangan hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat setelah kesepakatan minyak tersebut.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, deskriptif, dimana penulis mengumpulkan data melalui studi pustaka berupa buku, jurnal, serta sumber pustaka lainnya yang kemudian dianalisis lebih jauh dan digunakan untuk menjelaskan secara deskriptif fenomena yang terjadi berdasarkan fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik internasional, *the politics of oil*, dan kerja sama bilateral untuk memahami dampak kesepakatan tersebut terhadap kebijakan luar negeri Arab Saudi dan respon Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan ini tidak hanya menguatkan hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Arab Saudi, tetapi juga mempengaruhi posisi Amerika Serikat dalam kawasan. Minyak tidak hanya menjadi sumber energi tetapi juga menjadi alat diplomasi dan strategi politik yang digunakan Arab Saudi untuk meningkatkan pengaruhnya. Arab Saudi memanfaatkan kerja sama ini sebagai strategi diversifikasi ekonomi dan politiknya, sementara Amerika Serikat menghadapi banyak tantangan dalam mempertahankan dominasinya di Timur Tengah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam kajian hubungan internasional, khususnya terkait dinamika politik minyak dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri negara-negara besar. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut terkait perubahan aliansi strategis di Timur Tengah dan dampaknya terhadap stabilitas geopolitik global.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Arab Saudi, Kerja sama bilateral, Minyak, Tiongkok.

ABSTRACT

Syarifah Nabila Azzahyan. NIM E061201053. *The Influence of the China Saudi Oil Deal Agreement on Saudi Arabia and the United States Bilateral Relations. Under guidance of the Main Advisor, Prof. H. Darwis, MA, Ph.D and Advisor Abdul Razaq Z Cangara, S.IP., M.Si., MIR.*

This research is motivated by the tenuous relationship between Saudi Arabia and the United States which has driven Saudi Arabia to strengthen its ties with China. This study aims to analyze the effect of the oil deal between China and Saudi Arabia on bilateral relations between Saudi Arabia and the United States and understand how the development of relations between Saudi Arabia and the United States after the oil deal.

The research method used in this research is a qualitative, descriptive method, where the author collects data through literature studies in the form of books, journals, and other literature sources which are then further analyzed and used to descriptively explain the phenomena that occur based on existing facts. This research uses the approach of international political economy, the politics of oil, and bilateral cooperation to understand the impact of the agreement on Saudi Arabia's foreign policy and the United States' response. The results show that this agreement not only strengthens the economic relationship between China and Saudi Arabia, but also affects the position of the United States in the region. Oil is not only a source of energy but also a diplomatic tool and political strategy used by Saudi Arabia to increase its influence. Saudi Arabia utilizes this cooperation as its economic and political diversification strategy, while the United States faces many challenges in maintaining its dominance in the Middle East.

This research is expected to contribute to the study of international relations, especially related to the dynamics of oil politics and its impact on the foreign policies of major countries. In addition, this research can be the basis for further analysis related to changes in strategic alliances in the Middle East and their impact on global geopolitical stability.

Keywords: *United States, Saudi Arabia, Bilateral Agreement, Oil, China*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Ekonomi Politik Internasional	19
B. The Politics of Oil	37
C. Kerja Sama Bilateral	42
BAB III GAMBARAN UMUM	48
A. Dinamika Kerja sama Perdagangan Minyak Tiongkok - Arab Saudi Sebelum China - Saudi Arabia Oil Deal	48
B. Dinamika Kerja sama Perdagangan Minyak Arab Saudi - Amerika Serikat	55
C. Dinamika Kerja sama Perdagangan Minyak Tiongkok - Amerika Serikat	63
D. China - Saudi Arabia Oil Deal Agreement	68
BAB IV PEMBAHASAN	72
A. Pengaruh Kesepakatan Minyak Antara Tiongkok dan Arab Saudi Terhadap Hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat	72
B. Respon Arab Saudi dan Amerika Serikat Terhadap China - Saudi Arabia Oil Deal	84
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

DAFTAR SKEMA & GAMBAR

Skema 1. Kerangka Konsep	22
Gambar 1. Linimasa Hubungan Tiongkok dan Arab Saudi	61
Gambar 2. Linimasa Hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat	69
Gambar 3. Linimasa Hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat.....	74
Gambar 4. Linimasa Tiongkok-Saudi Oil Deal Agreement.....	77
Gambar 5. Gambaran Umum Tentang Preferensi Arab Saudi Dalam Seluruh Bidang Kebijakan	82
Gambar 6. Bagan Dampak Kesepakatan China-Saudi Oil Deal Terhadap Hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Total Impor Minyak Mentah Amerika Serikat November 2021-2024 (Ribuan barrel/hari).....	78
Tabel 2. Total Impor Minyak Bumi Amerika Serikat November 2021-2024	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi sejumlah pergeseran dinamika kekuatan global serta regional yang dipicu oleh dua negara yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat. Hubungan kedua negara ini sangat kompleks dan dinamis, namun semakin memburuk dalam beberapa dekade terakhir akibat ambisi Tiongkok untuk menggeser posisi Amerika Serikat sebagai negara *superpower* di dunia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok semakin meningkat setiap tahunnya diiringi oleh pembangunan industri serta infrastrukturnya sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan energi, khususnya minyak bumi (Ismira et al., 2022). Oleh karena itu, Tiongkok harus menjalin hubungan baik dengan negara penghasil minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya. Tiongkok kemudian memutuskan untuk bekerja sama dengan Arab Saudi sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Dilansir dari *Kompas*, tercatat bahwa Arab Saudi memiliki cadangan minyak bumi terbesar kedua di dunia sebanyak 297,6 triliun barrel yang menjadikan Arab Saudi sebagai negara dengan *power* yang besar di kawasan Timur Tengah (Dzulfaroh, 2020).

Arab Saudi mengeksport cadangan minyak buminya kepada negara-negara besar di dunia termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun, hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi telah memburuk sejak tahun lalu akibat Amerika Serikat yang mengecam keputusan Arab Saudi selaku pemimpin OPEC untuk

mengurangi produksi minyak demi menstabilkan pasar energi global (Wirengjurit, 2022). Pengurangan minyak ini berawal dari pandemi 2020 akibat Covid yang membuat harga minyak jatuh dan perekonomian global anjlok. Berdasarkan Badan Informasi Energi, pasokan minyak pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 6,6 juta barrel menjadi 469 juta barrel. Hal tersebut disebabkan oleh aktivitas penyulingan yang lebih tinggi dan impor minyak yang lebih rendah sehingga menghasilkan penurunan yang cukup ekstrem (CNN, 2021).

Pengurangan minyak ini juga masih terus berlangsung di tahun 2022 karena harga minyak masih terus merosot. Amerika Serikat bahkan menganggap bahwa keputusan Arab Saudi sebagai pemimpin OPEC merupakan sebuah bentuk dukungan pada Rusia karena keuntungan yang diperoleh atas sektor minyak tersebut digunakan oleh Rusia untuk membiayai perang di Ukraina. Selain itu, hubungan kedua negara yang semakin memburuk juga berujung pada penolakan Amerika Serikat untuk menjual senjata mereka ke Arab Saudi. Amerika Serikat beranggapan bahwa dengan memanfaatkan penolakan tersebut, mereka dapat memperingatkan Arab Saudi agar menjauhi Rusia (CNN, 2022).

Sebagai bentuk balasan, Amerika Serikat berjanji untuk memberikan konsekuensi atas tindakan Arab Saudi berupa Rancangan Undang-Undang *No Oil Producing and Exporting Cartels* (NOPEC). RUU ini dibuat oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden yang secara khusus melindungi konsumen dan bisnis Amerika Serikat dari kenaikan harga minyak. RUU ini dapat membuat sebagian besar dari negara-negara OPEC beserta mitranya terjerat tuntutan hukum atas dasar

pengurangan pasokan minyak mentah yang berujung pada ketidakstabilan pasar akibat kenaikan harga minyak di pasar global (Arbar, 2023).

Peristiwa ini akhirnya membuat Arab Saudi kecewa terhadap Amerika Serikat dan memutuskan untuk mendekatkan hubungannya dengan Tiongkok selaku negara pengimpor minyak kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Dengan hubungan yang semakin dekat, Tiongkok kemudian menjalin kesepakatan minyak dengan Arab Saudi yang bernilai sekitar 20 miliar USD. Kesepakatan ini menggeser kedudukan Amerika Serikat sebagai pengimpor minyak bumi terbesar Arab Saudi dan melibatkan berbagai perusahaan besar di Tiongkok seperti Sinopec dan China National Petroleum Corporation (CNPC) dengan Saudi Aramco. Kesepakatan ini meliputi pengiriman minyak mentah dengan total sekitar 1.9 juta barrel minyak per hari (Mae, 2023). Selain itu, Arab Saudi juga telah memutuskan untuk bermitra dengan blok keamanan yang dipimpin oleh Tiongkok yaitu Shanghai Cooperation Organization (SCO). SCO dibentuk pada tahun 2001 dan merupakan sebuah organisasi yang berfokus pada keamanan dan perdagangan yang beranggotakan Tiongkok, Tajikistan, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, India, Pakistan, dan beberapa negara lainnya.

Tiongkok juga berusaha membujuk Arab Saudi untuk melakukan *Local Currency Settlement* (LCS) dalam transaksi-transaksi mereka yang akan datang. Usulan tersebut telah dipertimbangkan oleh Arab Saudi, khususnya setelah perselisihannya dengan Amerika Serikat baru-baru ini. Melalui kerja sama minyak dengan menggunakan LCS, Tiongkok memberi insentif ekonomi bagi negara-negara yang menjalin hubungan erat dengannya, khususnya Arab Saudi. Melalui

kesepakatan tersebut, Tiongkok menawarkan perdagangan yang lebih fleksibel, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan akses pasar bagi negara-negara Timur Tengah. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat.

Jika terjadi ketidakstabilan dalam mata uang USD, transaksi menggunakan mata uang lokal melalui LCS dapat mengurangi dampak kerugian dari sistem keuangan global secara keseluruhan. Selain itu, penggunaan LCS dapat mengurangi resiko terkait fluktuasi nilai tukar serta kebijakan penerbit mata uang dominan. Dengan demikian, LCS ini membantu mengurangi tekanan terhadap perubahan kebijakan moneter negara tertentu dan memberikan stabilitas lebih besar dalam sistem keuangan global. LCS juga dapat memperkuat peran mata uang lokal dalam transaksi internasional sehingga hal ini dapat meningkatkan peran dan pengaruh mata uang lokal di pasar global dan memberikan kesempatan bagi negara-negara dengan mata uang yang tidak terlalu populer untuk memperluas pengaruh mereka dalam sistem global dan meningkatkan pluralitas dalam sistem keuangan global.

Kerja sama minyak antara Tiongkok dan Arab Saudi berpotensi dapat melemahkan kedudukan Amerika Serikat dan memperkuat pengaruh ekonomi Tiongkok di kawasan Timur Tengah, serta diperkirakan dapat menimbulkan dinamika hubungan regional dan stabilitas politik di kawasan tersebut. Kerja sama ini juga berpotensi dapat memperburuk hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat di masa depan. Penggunaan mata uang non-dolar dalam kerja sama ini dapat berdampak pada stabilitas pasar keuangan global karena USD masih menjadi mata uang dominan dalam transaksi internasional. Hal ini dapat mempengaruhi *foreign*

policy Amerika Serikat di Timur Tengah dimana kemungkinan besar negara tersebut akan berusaha mempertahankan kedudukannya dengan segala cara. Melalui kerja sama tersebut, Tiongkok dan Arab Saudi juga berpotensi memperoleh keuntungan dengan posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Namun, dampak lebih jauh terkait kesepakatan ini terhadap hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya seperti kebijakan ekonomi dan politik dari masing-masing negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak kesepakatan ini.

Penulis akan membahas “**Pengaruh China-Saudi Oil Deal Agreement Terhadap Hubungan Bilateral Arab Saudi dan Amerika Serikat**”. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih baik terkait faktor ekonomi yang mempengaruhi hubungan antar negara. Kasus ini dapat menjadi contoh yang dapat memberi pengaruh dan mengubah kekuatan dari masing-masing negara dalam hubungan politik mereka. Studi kasus ini dapat menjadi bahan analisis terkait kebijakan luar negeri Tiongkok yang berusaha untuk mendongkrak pengaruhnya di Timur Tengah dan dapat memberikan pemahaman tentang keterkaitan antara *foreign policy* dan kebijakan ekonomi dalam konteks global. Kasus ini juga dapat memberi contoh terkait bagaimana negara-negara di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, beradaptasi dengan perubahan geopolitik global serta strategi yang digunakan dalam menghadapi kedua negara ini.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Adapun batasan-batasan yang penulis terapkan yaitu berfokus pada kesepakatan minyak antara Tiongkok dan Arab Saudi yang terjadi di tahun 2021 hingga 2025 dan berpusat pada aktor negara yang terlibat seperti Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Batasan-batasan ini diterapkan oleh penulis agar dapat membatasi ruang lingkup penelitian demi kelancaran analisis mendalam terkait topik yang penulis lakukan. Penelitian ini berpusat pada aktor negara yaitu Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat agar dapat memfokuskan analisis pada interaksi ketiga negara yang relevan dengan judul penulis. Penelitian ini berfokus pada kawasan Timur Tengah terutama pada kesepakatan minyak antara Tiongkok dan Arab Saudi dan tidak berfokus pada negara lain di kawasan tersebut dengan pertimbangan keterbatasan sumber daya dan waktu.

Terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kesepakatan minyak antara Tiongkok dan Arab Saudi mempengaruhi hubungan kerja sama Arab Saudi dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana respon dari Arab Saudi dan Amerika Serikat terhadap China - Saudi Arabia Oil Deal ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk memahami bagaimana hubungan Arab Saudi dan Tiongkok dapat mempengaruhi dinamika politik antara Arab Saudi dan

Amerika Serikat serta bagaimana kerja sama tersebut berdampak pada stabilitas keseluruhan Kawasan Timur Tengah.

- b. Untuk memahami perkembangan hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat setelah kesepakatan minyak tersebut.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Memberi wawasan terkait dinamika hubungan internasional dan geopolitik di Kawasan Timur Tengah.
- b. Memberi pemahaman tentang strategi kebijakan luar negeri Tiongkok dan bagaimana hubungannya dengan Arab Saudi dan Amerika Serikat.
- c. Menyediakan wawasan bagi mahasiswa hubungan internasional sebagai referensi yang dapat dilanjutkan untuk penelitian berikutnya.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini menggunakan teori dan konsep Ekonomi Politik Internasional, *The Politics of Oil*, dan Kerja sama Bilateral. Konsep-konsep tersebut dijabarkan sebagaimana di bawah ini:

1. Ekonomi Politik Internasional

Negara dan pasar adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dapat dilihat melalui sektor politik yang direpresentasikan oleh negara dan ekonomi yang direpresentasikan oleh pasar. Ekonomi berkaitan dengan pencapaian kekayaan, sementara politik berkaitan dengan pencapaian kekuasaan. Kedua hal

tersebut merupakan inti dari ekonomi politik internasional (Jackson & Sorensen, 2013). Ekonomi Politik Internasional merupakan salah satu cabang disiplin ilmu dalam hubungan internasional yang membahas mengenai isu-isu ekonomi dan keterkaitan pengaruh faktor-faktor ekonomi dan politik dalam hubungan internasional. Konsep ini berfokus pada hubungan pasar dan negara serta *wealth* dan *power* suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain (Maiwan, 2015). Studi ekonomi sendiri belum mampu menjelaskan isu-isu vital terkait distribusi kekayaan dan aktivitas ekonomi internasional hingga dampak ekonomi dunia terhadap kepentingan nasional. Hal-hal tersebut harus dinilai melalui batas-batas politik negara yang dapat menggambarkan kebijakan ekonomi satu negara terhadap negara lainnya (Sudirman, 2016).

Setelah Perang Dunia II, muncul persaingan antara blok Barat (liberalis-kapitalis) dan blok Timur (sosialis-komunis) yang tidak hanya meliputi persaingan ideologi politik, namun juga ekonomi. Meskipun sebagian dari isu-isu yang muncul merupakan isu ekonomi, namun hal tersebut juga mempengaruhi sistem politik internasional. Oleh karena itu, dibentuklah pelebagaan sistem ekonomi internasional sebagai penunjang yang mengatur tatanan ekonomi internasional melalui organisasi-organisasi yang dapat memfasilitasi kerja sama ekonomi seperti IMF, ASEAN, World Bank, OPEC, dan lain sebagainya (Maiwan, 2015). Menurut Gilpin (2005), Ekonomi Politik Internasional merupakan interaksi pasar dengan aktor-aktor seperti negara, perusahaan multinasional, hingga organisasi internasional yang mengakibatkan terjadinya persaingan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Negara-negara kuat cenderung mencari lebih

banyak menjalin kerja sama ekonomi untuk meningkatkan pendapatannya, sementara negara-negara lemah berjuang untuk menghilangkan batasan ekonomi di tingkat nasional maupun global demi mengurangi kerugian yang mereka rasakan.

Sebagai upaya untuk memahami perkembangan ekonomi internasional, maka diperlukan pemahaman terkait teori-teori ekonomi, pola interaksi antar pemerintah, kebijakan domestik dari tiap negara, hingga mengenal organisasi politik internasional (Badiri, 2020). Nasionalisme Ekonomi atau yang biasa disebut sebagai teori merkantilis merupakan salah satu teori dari ekonomi politik internasional. Teori ini melihat negara sebagai peran utama dalam perdagangan internasional dan aktivitas ekonomi harus tunduk terhadap tujuan utama yaitu membangun negara yang kuat. Bisa dikatakan bahwa ekonomi merupakan alat politik dan merupakan dasar dari kekuasaan politik dengan kepentingan nasional sebagai tujuan akhir dari perdagangan. Menurut teori ini, perekonomian internasional merupakan sebuah medan konflik antara kepentingan nasional yang saling bertentangan, bukan sebuah wadah kerja sama yang bersifat saling menguntungkan. Persaingan ekonomi antara negara-negara tersebut merupakan permainan *zero-sum*, dimana keuntungan suatu negara merupakan kekalahan bagi negara lain (Jackson & Sorensen, 2013).

Adapun tokoh utama dari teori ini yaitu Alexander Hamilton dan Friedrich List. Alexander Hamilton merupakan salah satu pendiri Amerika Serikat sekaligus mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat, beliau berpendapat bahwa kebijakan perdagangan internasional suatu negara harus mengutamakan barang-barang manufaktur dibanding hasil-hasil bumi. Menurut beliau, dengan memproduksi

barang-barang manufaktur, sebuah negara dapat memperoleh keuntungan yang besar dalam perdagangan internasional. Keuntungan yang diperoleh kemudian dapat menjadi kekuatan nasional negara tersebut. Oleh karena itu, negara-negara yang sebelumnya mengimpor barang-barang manufaktur dari negara lain harus menerapkan kebijakan substitusi impor. Negara tersebut harus memproduksi sendiri barang-barang yang dibutuhkan rakyatnya, meskipun lebih menguntungkan jika mengimpor dari negara lain (Brown & Ainley, 2005).

Friedrich List, seorang teoritis lainnya berpendapat bahwa pentingnya campur tangan negara dalam sektor ekonomi, dimana keberhasilan ekonomi tidak dapat tercapai tanpa campur tangan politik (Brown & Ainley, 2005). Dalam konteks hubungan bilateral sebuah negara, List menjadikan Inggris sebagai contoh bagaimana negara tersebut berhasil menjadi negara imperium dunia dengan pengaruh yang sangat kuat di masa lalu dengan memanfaatkan kekuatan politik untuk memajukan industrialisasi negaranya. Inggris juga tidak segan-segan untuk menggunakan kekuatannya militer dalam menghadapi bangsa-bangsa lain. Perdagangan internasional Inggris mencapai kejayaan karena didukung oleh supremasi teknologi dan industri yang didorong dengan bidang militernya. Jadi, menurut perspektif beliau, negara yang kuat hanya bisa dicapai melalui nasionalisme ekonomi dan perdagangan. Hal tersebut bisa dicapai melalui proteksi, memasang tarif tinggi untuk barang impor, perlindungan buruh, dan lain sebagainya. Negara memiliki peran penting sebagai institusi politik, dimana perekonomian tunduk pada komunitas politik, khususnya pemerintah. Mereka

bertanggung jawab penuh dalam memajukan kepentingan nasional negara dengan cara apapun (Maiwan, 2015).

2. The Politics of Oil

Konsep *The politics of oil* membahas mengenai kompleksitas dan dinamika politik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan minyak mentah dalam skala internasional. Konsep ini juga mencakup sejumlah faktor, termasuk kepentingan ekonomi, geopolitik, keamanan nasional, dan dampak lingkungan dari industri minyak (Ismira et al., 2022). Selain itu, konsep ini juga menjelaskan bagaimana minyak berperan sebagai instrumen politik domestik maupun internasional. Minyak juga dapat berperan sebagai pemicu konflik internasional, dimana sebagian besar perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia dimiliki oleh pemerintah sehingga kepentingan politik dan minyak sangat sulit untuk dipisahkan. Mereka cenderung memanfaatkan minyak sebagai alat diplomasi maupun senjata politik (Djelantik, 2010).

Pasokan minyak berdampak pada harga minyak yang dipengaruhi oleh sistem penawaran dan permintaan. Apabila pasokan minyak yang ada melebihi permintaan pasar, maka harga minyak akan turun, sebaliknya jika pasokan minyak yang ada lebih sedikit dibanding permintaan pasar, maka harga akan naik. Peristiwa geopolitik juga menjadi penentu, contohnya di kawasan Timur Tengah yang terkenal sebagai produsen minyak mentah dunia. Kawasan ini seringkali mengalami konflik geopolitik sehingga berdampak pada jumlah pasokan dan harga minyak global, hal ini dapat menyebabkan lonjakan harga dengan cepat dan secara tiba-tiba mengalami penurunan (EIA, 2023).

Politik minyak sendiri dimulai dari penemuan sumber minyak, pengeboran sumur minyak atau eksploitasi sumber daya yang dilanjutkan dengan penyerahan atau pemberian kontrak yang dapat menimbulkan perbedaan kepentingan. Strategi minyak kemudian muncul sebagai strategi politik yang mengubah perpolitikan dunia menjadi politik minyak. Anarki dunia didasari oleh ambisi atas monopoli minyak akibat kekalahan poros dalam Perang Dunia II yang didasari oleh strategi blokade minyak yang merupakan strategi tak terduga dan merupakan konsep yang rasional dan relatif serta relevan dalam hubungan antarnegara (Fareed et al., 2019).

The Petroleum Game atau yang biasa disebut sebagai Permainan minyak merupakan permainan yang dimainkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengaruh geopolitik mereka dan lain sebagainya. Mereka dapat mengambil tindakan yang bersifat rahasia (*undercover actions*) maupun tindakan terselubung (*declared policies*) yang berupa hubungan diplomatik atau militer, dipromosikan oleh negara itu sendiri atau melalui proxy. Tindakan ini seringkali bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan keuntungan politik. Timur Tengah sendiri merupakan pusat energi dunia dimana setengah dari cadangan minyak bumi di dunia berada. Minyak bumi ini tentu saja hanya berada di beberapa lokasi saja dan tidak merata di seluruh dunia, sehingga negara-negara maju di dunia ingin memastikan mereka memiliki akses ke pasar. Minyak telah menjadi faktor dalam politik kekuatan besar, pengumpulan intelijen, upaya perubahan rezim, serta diskusi diplomatik tingkat tinggi. Negara yang memiliki kontrol atas akses ke minyak bumi dan harganya akan menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Akibatnya, minyak

bumi mulai beriringan dengan politik dan terkait erat dengan kekuasaan (Foster, 2018).

Juan Pablo Pérez Alfonzo atau yang biasa dikenal sebagai Pérez Alfonzo merupakan seorang tokoh politik dan mantan diplomat Venezuela yang memiliki pengaruh besar pada kebijakan minyak dunia pada masanya. Beliau merupakan pendiri dan presiden pertama OPEC di tahun 1960. Menurut beliau minyak bumi merupakan peranakan iblis yang dapat membawa kehancuran. Minyak bumi merupakan sebuah berkah sekaligus kutukan, dimana minyak bumi merupakan bahan bakar yang nyaman digunakan dan mudah dipindahkan. Pengeksportan minyak bumi dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah dan membantu keuangan negara, namun hal tersebut dapat menyebabkan kenaikan nilai tukar dan menghambat sektor produktif lainnya. Sehingga dapat dikatakan pasar minyak bumi sendiri merupakan sebuah *rollercoaster* dimana fluktuasi harga dapat mempengaruhi sektor ekonomi dan politik, baik negara eksportir maupun importir. Minyak bumi diasosiasikan dengan kekuasaan dan kekayaan sehingga minyak bumi menjadi komoditas yang paling dicari yang dapat mengundang persaingan dan konflik. Hal ini berhubungan langsung dengan ambisi Amerika Serikat yang ingin mengontrol Timur Tengah sebagai pusat dari penghasil minyak bumi dunia (Foster, 2018).

3. Kerja sama Bilateral

Kerja sama bilateral merupakan salah satu bentuk dari kerja sama luar negeri dimana dua negara menjalin hubungan kerja sama yang bertujuan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Kerja sama bilateral merupakan salah

satu hal mutlak bagi sebuah negara untuk menjaga perdamaian dunia, memenuhi kebutuhan ekonomi satu sama lain, mengatasi masalah global, dan lain sebagainya (Munatama, 2023). Sebagai bagian integral dari kerja sama luar negeri, bentuk kerja sama bilateral meluas ke berbagai sektor yang mencakup ekonomi, politik, infrastruktur, energi, dan lain sebagainya. Salah satu sektor utama dari kerja sama bilateral adalah sektor minyak dan gas yang melibatkan dua negara untuk bekerja sama dalam hal produksi, distribusi, maupun pemanfaatan sumber daya minyak mentah. Kerja sama ini kemungkinan besar berbentuk pengembangan lahan minyak bersama, produksi bersama, saling berbagi infrastruktur, atau kesepakatan perdagangan minyak (Suliantoro, 2023).

Kerja sama bilateral pada sektor minyak seringkali merupakan investasi jangka panjang yang mencakup aspek volume, harga, dan jangka waktu kontrak perdagangan. Kesepakatan tersebut dirancang agar dapat memastikan kestabilan pasokan dan permintaan dalam jangka waktu yang lebih luas (Djunedi, 2017). Dengan menjalin hubungan kerja sama pada sektor minyak, negara-negara yang terlibat dapat memanfaatkan sumber daya alam mereka secara maksimal, meningkatkan kapasitas produksi minyak mereka, dan pada akhirnya akan menciptakan keuntungan ekonomi yang signifikan di kemudian hari. Selain dampak ekonomi, kerja sama tersebut juga membentuk pondasi yang kuat untuk kebijakan luar negeri, terutama bagi negara-negara yang memiliki sumber daya minyak yang melimpah .

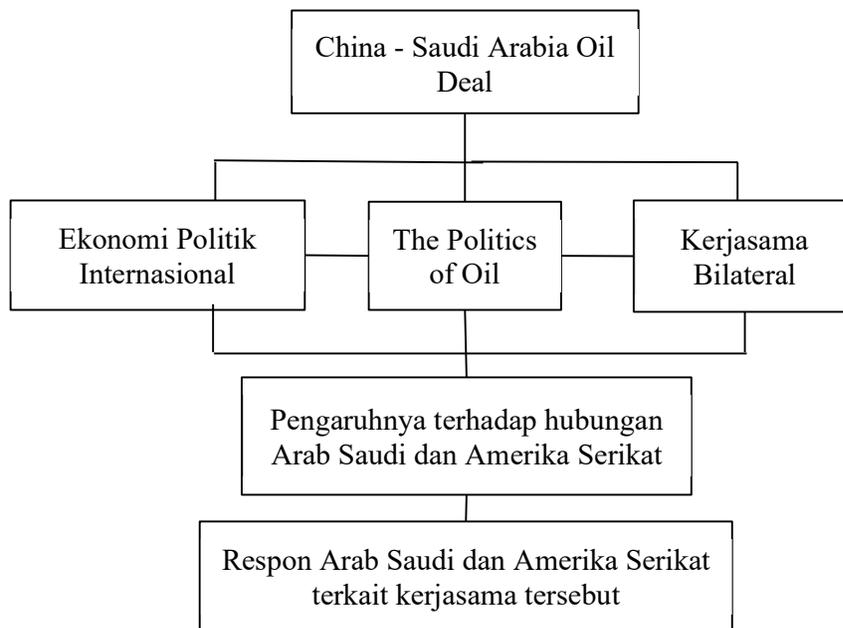
Kerja sama dalam sektor minyak dapat menjadi dasar untuk membangun hubungan diplomatik yang lebih kuat antara negara-negara produsen dan

konsumen. Kesepakatan ekspor-impor akan menciptakan hubungan ketergantungan yang dapat mendorong kebijakan luar negeri, seperti negosiasi bersama terkait kebijakan energi ataupun isu-isu terkait yang mencakup kebijakan harga minyak, regulasi produksi, kebijakan lingkungan terkait energi, dan membawa pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara (Arza, 2021). Negara-negara yang bukan produsen minyak bergantung pada pasokan minyak dari mitra dagang mereka untuk memenuhi kebutuhan energinya. Hal tersebut menciptakan dorongan untuk menjalin kerja sama dan saling berkoordinasi antara negara-negara produsen minyak dan konsumen melalui berbagai organisasi dan forum, seperti OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), IEF (International Energy Forum), IEA (International Energy Agency), GCC (Gulf Cooperation Council), dan lain sebagainya. Melalui organisasi dan forum tersebut, mereka merumuskan kebijakan bersama yang dapat mengamankan pasokan energi dan memitigasi ketidakstabilan harga minyak dunia. Keterlibatan dalam kerja sama minyak dapat mengurangi potensi konflik maupun persaingan sehingga dapat meningkatkan stabilitas regional. Kesepakatan ini juga dapat memunculkan inisiatif bersama bagi negara-negara yang terlibat untuk mengurangi dampak lingkungan dari eksploitasi minyak (IEF, 2023).

Pasokan minyak yang stabil menjadi prioritas dalam kebijakan keamanan nasional dari berbagai negara. Mereka berkomitmen untuk menjaga hubungan bilateral mereka agar dapat terus berkembang demi memastikan pasokan minyak yang sangat krusial untuk keberlanjutan ekonomi dan keamanan nasional mereka. Negara-negara yang memiliki sumber daya minyak yang besar memiliki pengaruh

ekonomi dan politik yang kuat di tingkat internasional, memungkinkan mereka untuk berperan lebih dalam pembentukan kebijakan berskala internasional. Negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi seringkali merancang kebijakan luar negeri yang berfokus pada sektor minyak dengan mempertimbangkan kompleksitas ekonomi dan politik internasional. Sebagai contoh, Arab Saudi yang merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia yang berperan penting dalam OPEC dan memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan harga minyak dunia.

4. Model Analisis



Skema 1. Kerangka Konsep

5. Asumsi Penelitian

Berdasarkan penjelasan kerangka konsep di atas, penulis berasumsi bahwa Kesepakatan minyak antara Tiongkok dan Arab Saudi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan politik dan ekonomi antara Arab Saudi dan Amerika

Serikat. Penulis berasumsi bahwa kesepakatan ini akan berperan signifikan dalam hubungan ekonomi Tiongkok dan Arab Saudi, dimana perjanjian ini memiliki dampak yang dapat dirasakan dalam skala geopolitik global. Penulis juga berasumsi bahwa faktor-faktor politik, termasuk kebijakan luar negeri Tiongkok dan Arab Saudi, dapat mempengaruhi pelaksanaan kesepakatan minyak ini. Kesepakatan ini juga dapat menjadi instrumen yang mempengaruhi arah kebijakan politik keduanya. Selain itu, penulis juga berasumsi bahwa kesepakatan ini dapat memperkuat keterlibatan Tiongkok di Timur Tengah yang akan mempengaruhi persepsi dan kebijakan Amerika Serikat pada Timur Tengah.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menginvestigasi dan memahami suatu fenomena dengan berfokus pada apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya (Chariri, 2009). Penulis ingin memahami kesepakatan minyak antara Tiongkok dan Arab Saudi terhadap hubungan Arab Saudi dan Amerika yang berlangsung pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Metode ini merupakan metode yang sesuai dengan kebutuhan penelitian penulis, sehingga diharapkan dapat berujung pada kesimpulan yang objektif.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam proses penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh melalui kajian

literatur terkait topik-topik yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku, artikel, majalah, dokumen resmi, website resmi dan sumber elektronik terpercaya lainnya

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai jenis material yang terdapat di perpustakaan (Sari & Asmendri, 2020). Penulis akan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian melalui literatur seperti buku, *e-book*, jurnal, artikel, majalah, dokumen resmi, serta sumber elektronik terpercaya lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif deskriptif. Data-data yang sebelumnya diperoleh akan dianalisis lebih jauh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data kemudian menjelaskan secara deskriptif fenomena yang terjadi berdasarkan fakta yang ada. Hasil analisis data yang diperoleh nantinya akan dijadikan kesimpulan dan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekonomi Politik Internasional

Dalam buku Mochtar Masoed yang berjudul *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, beliau mengutip buku (Frieden & Lake, 1991) yang mengatakan studi ekonomi politik internasional merupakan permainan politik dan ekonomi di tingkat global. Ekonomi diartikan sebagai sistem produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan, sementara politik diartikan sebagai sekumpulan lembaga dan aturan yang mengatur segala jenis interaksi sosial dan ekonomi. Ekonomi politik internasional ini memiliki terbagi menjadi beberapa ideologi dan aliran metodologi yang berbeda-beda, seperti perspektif realis-merkantilis, perspektif liberal, perspektif strukturalis-reformis, dan lain sebagainya. Namun, awalnya para cendekiawan menanggapi politik dan ekonomi sebagai dua hal yang terpisah. Di abad ke-17, ajaran merkantilis mendominasi interaksi hubungan internasional, kemudian dilanjutkan oleh kaum Marxis hingga abad ke-20 yang menegaskan perlunya atensi terhadap isu-isu ekonomi politik internasional. Namun, pada awal abad ke-20 terjadi sejumlah perubahan dalam dunia akademik ilmu sosial, dimana mulai timbul kecenderungan untuk melakukan spesialisasi bidang studi (Masoed, 2014).

Pada zaman itu, timbul perubahan orientasi dimana para ilmuwan menolak gagasan klasik yang mencampurkan filsafat politik dan kebijakan ekonomi. Mereka menerapkan kerangka berpikir filsafat logika positivis sehingga timbul ilmu

ekonomi modern yang bersifat positivistik dan empirik yang terpisah dari analisis politik. Hal tersebut benar-benar berbeda dari ilmu ekonomi sebelumnya yang cenderung bersifat lebih teoritis dan berorientasi kebijakan (Harrod, 1980). Akibatnya, studi ekonomi politik internasional terpecah menjadi ilmu politik internasional dan ilmu ekonomi internasional. Para ahli ekonomi yang menganalisis proses dan kebijakan ekonomi internasional mengabaikan faktor politik, sementara ahli politik menganggap isu ekonomi sebagai *lower politics* yang bukan pokok dari hubungan internasional (Massoed, 2014).

Hal tersebut terus berlangsung hingga tahun 1970 dimana ekonomi politik internasional kembali bangkit. Bangkit kembalinya ekonomi politik internasional ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu munculnya negara-negara kurang berkembang sebagai aktor politik dunia dengan serangkaian tuntutan ekonominya. Hal tersebut melahirkan cabang ilmu ekonomi baru yang dinamakan ilmu ekonomi pembangunan. Sebelumnya, di tahun 1960-an negara-negara bekas jajahan tidak dapat bergerak bebas kecuali dengan izin negara penjajahnya. Para ilmuwan menganggap bahwa negara bekas jajahan dalam ekonomi global hanya sebagai penghasil bahan mentah untuk dimanfaatkan oleh negara-negara industri maju. Negara-negara bekas jajahan tersebut cenderung dilanda kemiskinan, namun hal tersebut sudah dianggap hal yang umum sebagai akibat dari masalah internal negara itu sendiri. Barulah pandangan tersebut berubah di tahun 1964 ketika negara yang baru merdeka sudah cukup banyak dan mereka mulai menyuarakan pendapat mereka pada PBB untuk meningkatkan posisi ekonomi mereka dalam sistem global

sehingga konsep politik internasional diterapkan kembali dalam ekonomi internasional (Massoed, 2014).

Bangkitnya ekonomi politik internasional juga disebabkan oleh kemunculan perusahaan-perusahaan multinasional sebagai salah satu aktor berskala internasional yang tidak dapat diabaikan secara politik. Hal tersebut menimbulkan perdebatan terkait hakikat kedaulatan negara, kebijakan penetrasi ke dalam sistem politik suatu negara, serta *power* yang dimilikinya. Namun, fokus utama perdebatan ini terdapat pada efek politik dari perpindahan lokasi produksi industrial dunia, sehingga pembahasan mengenai keuntungan dan kerugian dari *direct foreign investment* yang hanya menekankan pada dimensi ekonomi saja menjadi tidak relevan lagi. Selain itu, merosotnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju sejak awal tahun 1970-an juga ikut memicu bangkitnya ekonomi politik internasional. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan bagian dari suatu peraturan yang bersifat alami. Hal tersebut memungkinkan dipertahankannya suatu sistem distribusi pertumbuhan dari berbagai kelompok yang dapat bersaing secara adil dan menjamin kehidupan politik yang cukup stabil dan damai. Namun, ketika pertumbuhan tersebut merosot, maka sistem distribusi yang awalnya bersifat “*positive-sum game*” berubah menjadi “*zero-sum game*” yang bersifat konfliktual. Akibatnya, muncul fenomena stagflasi yang merupakan situasi dimana perekonomian menjadi stagnan disertai inflasi yang tajam. Hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya krisis pemerintahan akibat pemerintah yang tidak mampu mengontrol hal tersebut (Jones, 1983 as cited in Massoed, 2014). Negara-negara yang semula menganggap bahwa mereka dapat menyelesaikan persoalan

domestiknya dengan melakukan kerja sama internasional pada akhirnya kembali berkonflik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara kebijakan ekonomi luar negeri, perekonomian internasional, manajemen ekonomi domestik, serta konflik internasional yang berlangsung pada saat itu.

Ekonomi Politik Internasional sebagai sebuah kajian mempelajari dinamika perekonomian global yang berpusat pada pertarungan politik antara yang kuat dan lemah dari pasar global (Badiri, 2020). Fokus utama dari kajian ini adalah bagaimana pertarungan politik yang terjadi antara negara yang kuat dan lemah dapat membentuk sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah negara terkait. Oatley (2006), membagi bidang kajian dalam studi ekonomi politik internasional menjadi empat isu utama, yaitu Sistem Perdagangan Internasional, Sistem Moneter Internasional, Perusahaan Multinasional, dan Pembangunan Ekonomi. Isu-isu ini dapat dipelajari secara terpisah, namun mereka saling berkaitan dan memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ekonomi politik internasional terbagi menjadi beberapa perspektif yang akhirnya menjadi teori utama dalam kajian ekonomi politik internasional. Teori-teori yang dimaksud yaitu: merkantilisme, liberalisme ekonomi, dan Marxisme.

1. Merkantilisme

Merkantilisme merupakan pandangan dunia terkait elit politik yang berada di garda terdepan dalam proses pembangunan negara. Mereka berpendapat bahwa aktivitas perekonomian sudah sepatutnya tunduk terhadap tujuan utama pembangunan negara yang kuat. Bentuk utama dari

pemikiran Merkantilisme yaitu ekonomi sebagai alat politik dan dasar bagi kekuatan politik. Mereka menganggap perekonomian internasional sebagai arena persaingan antara kepentingan nasional yang saling bertentangan dibandingkan wadah menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Persaingan ekonomi tersebut merupakan '*zero-sum game*' yaitu keuntungan suatu negara merupakan kerugian bagi negara lain. Negara-negara tersebut memantau pertumbuhan ekonomi relatif karena kekayaan materi suatu negara dapat menjadi dasar kekuatan politik-militernya untuk melawan negara lain (Jackson & Sorensen, 2013).

Merkantilisme atau yang biasa disebut sebagai nasionalisme ekonomi merupakan sebuah teori dan praktek ekonomi yang populer bagi negara-negara yang sedang membangun kekuatannya. Upaya tersebut memerlukan integrasi politik dan ekonomi sehingga negara merupakan aktor utama yang mengatur ekonomi demi meningkatkan *power* negara. Membangun negara yang kuat memerlukan akumulasi aset kekayaan atau kapital, oleh karena itu pembangunan ekonomi menjadi prioritas negara. Apabila upaya akumulasi tersebut tidak cukup dilakukan di dalam negeri, maka negara beralih ke perdagangan internasional sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Demi memperoleh surplus sebanyak mungkin dari perdagangan internasional yang penuh dengan konflik, pemerintah masing-masing negara perlu mengembangkan strategi "nasionalis-ekonomi" yaitu:

- a. Menerapkan pengendalian harga dan upah buruh sehingga barang-barang yang dihasilkan dapat dijual dengan harga bersaing di pasar internasional
- b. Memberlakukan strategi industrialisasi substitusi-impor
- c. Meningkatkan ekspor barang manufaktur dan mengurangi impor hanya untuk komoditi pasar.

Strategi ini dianggap penting dalam upaya memenangkan perang ekonomi dalam kancah internasional (Masoed, 2014).

Nasionalisme ekonomi bukan hanya sekedar motivasi nasionalis yang diterapkan dalam kebijakan ekonomi, namun harus dilihat sebagai serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan, memperkuat, dan melindungi perekonomian nasional dalam konteks pasar dunia. Kebijakan ini tidak selamanya bertentangan dengan aktivitas ekonomi eksternal, namun bertentangan dengan melepas nasib suatu negara yang akan ditentukan oleh pasar dunia. Kebijakan-kebijakan ini meliputi pengendalian keuangan untuk menetapkan mata uang, pengendalian impor untuk memonopoli pasar dalam negeri, dan pengendalian modal untuk mengarahkan investasi pada sektor-sektor prioritas. Dalam beberapa kasus, nasionalisme ekonomi ini juga memiliki tingkatan yang lebih lanjut, seperti nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang mengeksploitasi sumber daya alam, pertambangan, ataupun minyak; pengurangan staf asing; pengambilan keuntungan dari modal asing; perampasan hak penangkapan

ikan dan eksplorasi dengan memperluas perairan lepas pantai; dan lain sebagainya (Pryke, 2012).

Menurut merkantilisme, perubahan ekonomi-politik hanya dapat terjadi apabila terjadi perubahan dalam distribusi atau perimbangan kekuatan. Oleh karena itu, jika suatu negara ingin merubah sistem ekonomi internasional yang tidak mendukung kepentingannya, maka negara tersebut harus mampu mengubah distribusi kekuatan politik internasional. Apabila negara tersebut tidak memiliki *power* yang cukup besar, maka kaum merkantilis menyarankan agar pemerintah dari negara tersebut melakukan intervensi pasar untuk melindungi perekonomian domestiknya dari dominasi asing. Kaum merkantilis melihat perdagangan bebas sebagai ideologi negara yang memiliki posisi dan *power* yang tinggi dalam sistem internasional. Ideologi tersebut dikembangkan oleh negara hegemoni sebagai upaya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, yaitu mengembangkan kekuasaannya seluas mungkin (Massoed, 2014).

Persaingan ekonomi antar negara terbagi menjadi dua bentuk yang berbeda, bentuk pertama disebut sebagai merkantilisme bertahan dan yang kedua disebut sebagai merkantilisme agresif. Merkantilisme bertahan atau yang disebut juga '*benign*' dimana negara berupaya memelihara kepentingan nasionalnya karena hal tersebut merupakan unsur penting dari keamanan nasionalnya dan kebijakan tersebut tidak berdampak negatif pada negara lain. Sedangkan merkantilisme agresif atau yang disebut sebagai '*malevolent*' merupakan kebalikan dari bentuk sebelumnya, dimana negara-

negara berupaya mengeksploitasi perekonomian internasional contohnya seperti imperialisme kolonial yang dilakukan oleh bangsa Eropa di Asia dan Afrika. Oleh karena itu, merkantilisme menganggap ekonomi dan kekuatan militer-politik sebagai satu elemen yang saling melengkapi dalam lingkaran arus balik positif. Pencapaian kekuatan ekonomi dapat mendukung kekuatan politik dan militer negara, kekuatan politik dan militer tersebut juga dapat memperkuat kekuatan ekonomi negara (Jackson & Sorensen, 2013).

2. Liberalisme Ekonomi

Liberalisme merupakan perspektif atau teori yang muncul sebagai alternatif dan bentuk kritik terhadap merkantilisme. Perspektif ini dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo yang meyakini bahwa pasar akan meluas secara spontan selaras dengan kebutuhan manusia dan pemerintah tidak seharusnya ikut campur dalam hal tersebut. Beliau juga berpendapat bahwa ekonomi pasar merupakan sumber utama kemajuan, kerja sama, dan kesejahteraan. Apabila negara memutuskan untuk ikut campur, hal tersebut akan menyebabkan kemunduran, tidak ekonomis, dan konflik. Menurut perspektif liberal, cara yang paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah dengan membebaskan pertukaran individu dalam ekonomi domestik dan internasional, yang kemudian disebut sebagai pasar bebas. David Ricardo berpendapat bahwa perdagangan bebas akan memberi keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat karena perdagangan bebas menyebabkan spesialisasi yang dapat

meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu negara. Hal tersebut disebut sebagai hukum keunggulan komparatif, dimana salah satu dari dua kawasan saling mengembangkan produk yang menurutnya memiliki keuntungan komparatif sehingga perdagangan yang terjadi akan saling menguntungkan kedua kawasan tersebut (Jackson & Sorensen, 2013).

Konsepsi liberal ini didasari oleh gagasan terkait kedaulatan pasar dalam proses ekonomi dimana terdapat keselarasan kepentingan antara berbagai manusia dan bangsa. Jika individu dibebaskan untuk mengejar kepentingannya dalam perdagangan ekonomi, maka kesejahteraan dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Kaum liberal juga berasumsi bahwa individu yang terdiri atas konsumen, perusahaan, maupun wiraswasta individu merupakan aktor utama yang selalu berperilaku rasional dan bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan. Tindakan rasional yang dimaksud ialah tindakan yang didasari oleh hasil kalkulasi untung-rugi dari berbagai probabilitas yang ada. Seorang aktor dianggap telah memaksimalkan pendapatan ketika aktor tersebut telah memperhitungkan untung-rugi dan memilih pilihan yang menghasilkan kepuasan subjektif tertinggi (Massoed, 2014).

Sejarah mencatat bahwa melalui perspektif liberalisme, ekonomi politik internasional di abad ke-16 dan ke-17 lahir di Eropa sebagai sebuah kritik terhadap kontrol politik dan pengaturan permasalahan ekonomi secara menyeluruh oleh negara. Liberalisme ekonomi berdiri atas penolakan berbagai praktek kebijakan yang mengaitkan ekonomi dan politik. Asumsi

liberal juga melihat bahwa ekonomi adalah suatu *positive sum game*, dimana keberhasilan suatu negara akan kekuasaan yang kuat selalu disertai dengan perekonomian yang kuat pula (Jackson & Sorensen, 2013).

Adam Smith, bapak liberalisme ekonomi, mengungkapkan bahwa pasar ekonomi cenderung meluas secara spontan demi memenuhi kebutuhan manusia dan menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memiliki campur tangan atas hal tersebut. Hal ini kemudian diperkuat oleh pemaparan Adam Smith atas model kerangka pemikiran liberalnya yang memperlihatkan ekonomi pasar adalah sumber utama kemajuan, kerja sama, serta kesejahteraan, artinya campur tangan politik dan peraturan negara hanya akan menimbulkan sifat tidak ekonomis, kemunduran, dan menyebabkan konflik (Jackson & Sorensen, 2013).

Lebih lanjut, ekonomi liberal juga menolak pandangan merkantilis yang melihat negara harus menjadi aktor sentral yang fokus ketika menghadapi permasalahan ekonomi, dimana aktor sentral yang dimaksud disini adalah negara memiliki aktor yang bergerak sebagai konsumen dan produsen didalamnya, padahal, liberalisme menilai bahwa pasar adalah wadah tukar barang-jasa bagi setiap aktor individu secara bebas dan terbuka (Jackson & Sorensen, 2013).

Sebagai pakar ekonomi liberal, Ricardo (1973: 81) berpendapat bahwa dalam sistem perdagangan bebas sempurna, liberalisme telah mendorong setiap negara secara alamiah mencurahkan modal dan tenaga kerjanya pada tahap *win-win* atau menguntungkan bagi masing-masing

negara. Artinya, dalam perekonomian global, liberalisme melihat bahwa perdagangan bebas dan kekayaan global akan terus meningkat dikarenakan semua negara akan menghasilkan masing-masing keuntungannya melalui spesialisasi spesifik yang dimiliki oleh negaranya. Gilpin (1987: 27) menilai bahwa liberalisme ekonomi adalah sebuah doktrin dan begitu berpegang teguh atas pengorganisasian kesejahteraan individu melalui pertumbuhan ekonomi. Dari pandangan liberal atas model perekonomian internasional yang sepatutnya berdasar pada perdagangan bebas, adapun pandangan para ekonom liberal abad ke-20 dan ke-21 yang mendukung keterlibatan negara dalam meningkatkan pasarnya (Jackson & Sorensen, 2013).

Dr. Mochtar Mas'ood menjelaskan perspektif ekonomi melalui kacamata liberalisme, dimana ekonomi politik internasional bagi kaum liberal, individu harus dilibatkan sebagai aktor unit analisis yang bergerak secara rasional dan bertugas memaksimalkan suatu perolehan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan global dengan menekankan sifat hubungan dan sistem harmoni serta saling menguntungkan. Kaum liberal menilai bahwa peran suatu negara dalam perspektif ekonomi politik internasional adalah bersifat sekunder, artinya negara memiliki batasan sebagai penjamin pasar bebas (Masoed, 2014).

Selain itu, secara hubungan ekonomi dan politik suatu negara, liberal menilai bahwa ekonomi yang seharusnya menentukan arah politik suatu negara, yang artinya negara dapat memanfaatkan sistem internasional, namun demi efisiensi, negara diharapkan tidak melakukan intervensi

menyeluruh atas pasar. Kaum liberal juga berasumsi, bahwa aktor unit analisis liberalnya dapat dianggap maksimal apabila aktor tersebut memilih pilihan yang menghasilkan kepuasan secara subyektif selepas melakukan kalkulasi untung-rugi untuk berbagai kemungkinan (Massoed, 2014).

Kembali membahas soal gabungan penilaian liberal David Ricardo dan Adam Smith, dimana konsepsi liberal Ricardian-Smithian mendasari gagasan tentang kedaulatan atau kebebasan pasar dalam proses ekonomi. Ricardian-Smithian juga mengasumsikan proses ekonomi timbul dari adanya keselarasan kepentingan alamiah dari satu aktor dengan aktor lainnya. Maka, konsepsi tersebut menegaskan bahwa kebebasan individu atau aktor dalam mengejar kepentingannya dalam proses perdagangan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Dengan demikian, kaum liberal, menilai ekonomi dan politik merupakan disiplin yang terpisah. Artinya, peran negara terbatas hanya sampai pada tahap pengelolaan pasar demi menjamin terlaksananya proses perdagangan secara menguntungkan.

Gilpin (1987: 41-42), membagi prinsip teori ekonomi liberal menjadi dua kelompok, yaitu yang dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo untuk aliran klasik, serta kelompok neo-klasik dengan tokoh-tokoh seperti Samuelson dan Paul Krugman. Perbedaan antara aliran klasik dan neo klasik ialah dimana liberal klasik lebih berpegang pada gagasan keunggulan absolut atau *Absolute Advantage*. Keunggulan Absolut dari aliran klasik melihat kunci suatu kekuatan serta kemakmuran negara berada

pada pertumbuhan ekonomi yang bersarana pada perdagangan internasional, dimana perdagangan internasional harus datang dari *Division of Labour* atau pembagian kerja secara spesialisasi. Bagi pandangan liberal klasik, negara harus menciptakan produksinya sesuai dengan kemampuannya masing masing (Maiwan, 2015).

Di sisi lain, teori liberal Heckscher dan Ohlin (H-O) menunjukkan bahwa perbedaan dalam sumber daya alam dan harga faktor produksi di antara negara merupakan faktor utama yang menentukan perdagangan internasional. Teori ini menyatakan bahwa setiap negara cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang berlimpah dan murah secara relatif, sementara mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi yang langka dan mahal secara relatif. H-O juga meyakini bahwa perdagangan akan mengurangi perbedaan harga absolut dan relatif dari faktor produksi di antara negara sebelum adanya perdagangan. Dalam konteks yang berbeda, sistem ekonomi global akan menghadapi tantangan yang signifikan tanpa adanya kekuatan hegemonis yang mampu bertindak atas nama komunitas ekonomi internasional. Para teoritis hegemonis berpandangan bahwa sistem ekonomi yang liberal dan terbuka memerlukan pengawasan dari kekuatan tertentu untuk mencegah benturan kepentingan yang keras antar bangsa, bahkan anarki di mana negara kuat dapat mengeksploitasi negara-negara yang lebih lemah. Dalam kerangka ini, Kindleberger lebih menekankan konsep "kepemimpinan" daripada hegemoni (Maiwan, 2015).

3. Marxisme

Secara umum, marxisme melihat hubungan antara ekonomi dan politik saling terkait, namun ekonomi selalu ditempatkan prioritas untuk menentukan sebuah kelas masyarakat maupun negara. Dari hal tersebut hadirlah pernyataan yang melihat bahwa pendekatan marxis menjadikan ekonomi sebagai wilayah eksploitasi dan ketidaksamaan antara kelas sosial, dan pada tahap politiknya selalu ditentukan oleh konteks sosio-ekonomi. Bapak marxisme, Karl Marx atas pendekatan ekonominya merepresentasikan dunia perekonomian sebagai arena eksploitasi manusia dan perbedaan kelas. Dimana Marx dan kaum marxis lainnya sepakat dengan perspektif merkantilis yang melihat bahwa ekonomi dan politik hadir untuk saling berkaitan satu sama lain, artinya marxisme menolak pandangan liberal perihal bidang ekonomi yang harus berdiri independen dengan hukumnya sendiri. Karl Marx juga menilai bahwa sifat eksploitatif ekonomi kapitalis terhadap kaum buruh atau proletar bukanlah hal yang negatif, melainkan kapitalisme baginya adalah sebuah kemajuan. Marx yakin bahwa kapitalisme dapat membuka jalan bagi revolusi sosial dimana alat-alat produksi dapat ditempatkan dalam kontrol sosial yang tentunya dapat menguntungkan kaum proletar. Sehingga hal tersebut menyimpulkan bahwa pandangan marxis juga bersifat materialis, dimana didasari pada klaim bahwa aktivitas inti dalam kehidupan bermasyarakat kerap menyangkut pautkan cara individu untuk memenuhi kepentingannya,

seperti produksi ekonomi adalah basis bagi semua aktivitas manusia, termasuk politik (Jackson & Sorensen, 2013).

Sebagai contoh, Marx dan Engels (1955:17) melihat industri modern telah mengubah bengkel-bengkel kecil menjadi pabrik besar kapitalis industrial yang mengorganisir massa buruh. Dalam studi ekonomi politik internasional, kaum marxis menganggap negara digerakkan oleh kepentingan kelas yang berkuasa, seperti negara kapitalis yang digerakkan oleh kepentingan kaum borjuis. Hal tersebut berarti negara tidaklah otonom dan perjuangan antarnegara, termasuk peperangan seharusnya dilihat dalam konteks persaingan ekonomi antara kelas kapitalis dari negara yang berbeda, sehingga kaum marxis sepakat bahwa konflik kelas justru lebih mendasar dibanding konflik antarnegara. Selain itu, marxis dalam studi EPI juga melihat suatu sistem ekonomi kapitalis bersifat ekspansif, dimana sistem ekonomi suatu negara akan selalu mencari pasar baru yang lebih menguntungkannya. Berbicara soal konflik, kaum marxis berpendapat bahwa konflik antar negara begitu bervariasi, seperti konflik antara negara-negara kapitalis yang selalu dihubungkan dengan era sejarah kapitalis tersebut. Akibatnya, hal tersebut menciptakan kompetisi dan konflik yang berdasar pada sejarah-sejarah sebelumnya (Jackson & Sorensen, 2013).

Menurut Wallerstein (1974), ajaran-ajaran marxisme melihat bahwa tatanan ekonomi internasional hadir dengan sifat yang saling berkaitan satu sama lain secara sistemik. Artinya, dunia internasional hanya dapat dipahami sebagai sistem global yang digerakkan oleh suatu divisi tunggal

dan budaya jamak sehingga melahirkan hirarki internasional yang memiliki sifat pusat maju dan dominan, serta pinggiran dengan sifat tergantung keterbelakangan, artinya hirarki tersebut menciptakan keadaan negara yang hanya fokus memperjuangkan kelas yang tidak akan pernah berakhir, hal tersebut dikarenakan baik secara ekonomi maupun politik, pusat tersebut akan berperan sebagai metropolis yang menciptakan keterbelakangan di daerah-daerah pinggiran, sehingga hubungan antara pusat (*center*) dan pinggiran (*periphery*) akan selalu bercorak eksploitatif. Selain itu, marxisme juga mengajarkan untuk melihat model ekonomi internasional sebagai kompetisi pertarungan kepentingan antara negara-negara maju sebagai pusat (*center*) dengan negara-negara pinggiran (*periphery*) lemah dan keterbelakangan (Maiwan, 2015).

Wallerstein juga menilai bahwa sistem ekonomi internasional yang kapitalis, berkembang melalui kecenderungan sekulernya yang meliputi proses (*in corporation*) atau pencaplokan, industrialisasi, komersialisasi agraria, serta proletarianisasi. Hal tersebut kemudian dipertegas dengan perspektifnya yang melihat bahwa ekonomi global bergerak dengan putaran irama ekspansi dan stagnasi yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan permintaan dan penawaran barang dunia secara berulang kali sehingga menempatkan kedudukan suatu negara dengan kelas posisi sentral, semi pinggiran, hingga pinggiran (Maiwan, 2015).

Berbicara soal kekuasaan dan hubungan kerja sama, Antonio Gramsci sebagai salah seorang intelektual neo-Marxis, berargumen bahwa

hubungan kerja sama melalui pola dominasi antara satu negara ke negara lainnya, sebenarnya tidaklah bersifat anarki. Sebaliknya, marxis lebih melihatnya sebagai satu hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik serta ideologi yang dibina melalui mekanisme konsensus (Maiwan, 2015). John Maynard Keynes membuat suatu pendekatan ekonomi yang memadukan unsur neo-Marxis dalam teori ketergantungannya, kita dapat melihat 4 poin yang mendasar dari bentuk ketergantungan ekonomi, yang mana diantaranya yaitu adanya:

- a. Pengembangan permintaan internal yang berkaitan dengan pasar nasional secara terus menerus.
- b. Kesadaran akan pentingnya sektor industri untuk mencapai tingkat pembangunan nasional yang lebih baik.
- c. Keinginan untuk meningkatkan pendapatan pekerja demi menghasilkan permintaan agregat yang lebih besar dalam dinamika pasar nasional.
- d. Dorongan pada peran pemerintah untuk lebih efektif dalam memperkuat kondisi pembangunan nasional dan meningkatkan standar hidup negara.

Foster-Carter (1973), menemukan 3 perbedaan mendasar antara marxisme klasik serta neo-marxisme. Pertama, pada tingkat analisisnya, marxisme klasik berfokus pada analisis peran monopoli yang tersebar pada skala global, sedangkan neo-marxis justru fokus menganalisis dan memberikan pandangan dari kondisi periferal. Kedua, marxisme klasik pada pola pergerakannya melihat bahwa revolusi

borjuis sangatlah diperlukan dalam menerapkan proses transformasi, sedangkan neo-marxis lebih menekankan pergerakan yang mempertimbangkan dan mengikuti kondisi terkini negara-negara global. Ketiga, marxis klasik beranggapan bahwa proletariat industri mempunyai kekuatan untuk menjadi garda terdepan revolusi sosial, sedangkan neo-marxis menekankan bahwa kelas revolusioner harus terdiri dari kaum tani dalam melaksanakan konflik revolusioner (Reyes, 2009).

Dari pemaparan di atas, penulis menggunakan teori nasionalisme ekonomi sebagai salah satu alat bantu analisis yang relevan untuk membedah lebih dalam penelitian yang penulis lakukan. Beberapa ciri khas yang menunjukkan nasionalisme ekonomi termasuk proteksionisme, penguasaan negara atas sektor strategis, dan penguatan industri lokal. Kebijakan yang melindungi industri domestik dari pesaing asing dikenal sebagai proteksionisme. Arab Saudi mungkin menggunakan kesepakatan minyak ini sebagai langkah proteksionis untuk mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat dan diversifikasi mitra dagang mereka. Berbicara tentang kontrol negara atas sektor strategis, kita berbicara tentang bagaimana negara mengontrol sektor-sektor penting seperti energi. Kesepakatan minyak ini merupakan upaya Arab Saudi untuk mempertahankan kendali atas industri energi dan mengurangi pengaruh negara lain terhadap kebijakan ekonominya sendiri. Upaya untuk memperkuat dan mengembangkan industri dalam negeri adalah bagian dari penguatan industri lokal. Melalui transfer teknologi, investasi yang lebih besar, dan pelatihan tenaga kerja lokal.

Kesepakatan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi dan strategi politik Arab Saudi dan Tiongkok. Arab Saudi tampaknya berusaha untuk memperluas pasar energinya dan mengurangi ketergantungannya pada pasar Barat, terutama Amerika Serikat. Sebaliknya, Tiongkok berusaha untuk mendapatkan pasokan energi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonominya yang cepat. Dilihat dari sudut pandang nasionalisme ekonomi mereka, kesepakatan ini dapat dianggap sebagai upaya strategis yang diambil kedua negara untuk meningkatkan otonomi perekonomiannya.

B. The Politics of Oil

Minyak bumi merupakan salah satu komoditas paling berharga dalam perdagangan global yang setiap tahunnya semakin berkembang dan menjadi salah satu sumber energi terpenting dalam satu abad terakhir. Beberapa negara memiliki sumber daya minyak yang melimpah dan memanfaatkan hal tersebut untuk pembangunan ekonomi negaranya, sementara beberapa negara lainnya membutuhkan minyak untuk membangun negaranya. Mereka membangun jalur-jalur pipa yang dapat memindahkan minyak tersebut dari area satu ke yang lainnya. Namun, minyak bumi merupakan zat yang rumit. Minyak bumi mengandung berbagai macam hidrokarbon dan memiliki karakteristik yang bervariasi, sehingga teknik ekstraksi, penyulingan, serta transportasinya juga bermacam-macam (Foster, 2018). Terlepas dari kompleksitasnya, pasokan minyak bumi dapat berjalan dengan lancar berkat sistem pasokan global. Minyak bumi merupakan sumber kehidupan ekonomi kontemporer, sehingga baik pemerintah maupun perusahaan minyak berusaha keras untuk memastikan adanya pasokan yang konsisten. Apabila hal

tersebut tidak tercapai, maka perekonomian akan anjlok seketika. Akses terhadap pasar minyak sangat penting bagi seluruh negara, terlepas dari jumlah kekayaan negara itu sendiri.

Methane, Ethane, Propane, dan Butane merupakan hidrokarbon yang sangat ringan dan berbentuk gas di suhu normal yang membentuk gas alam yang juga dapat ditemukan dalam minyak bumi. Dulunya, gas tersebut menjadi bahan bakar utama di dunia yang disebut sebagai *Cinderella Fuel* karena potongan harga yang sengaja diberikan untuk mendukung pemasaran dan penjualan bahan bakar tersebut (Foster, 2018). Saat ini gas alam jauh lebih dihargai karena kandungannya yang rendah sulfur dan pembakarannya yang bersih dan dampaknya terhadap lingkungan. Gas alam dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar cair karena pencemaran udara yang ditimbulkan jauh lebih sedikit.

Meskipun dianggap vital dalam perekonomian *modern*, produksi minyak bumi saat ini sedang diawasi karena dampaknya terhadap perubahan iklim. Mayoritas ilmuwan saat ini setuju bahwa apabila kita ingin mencegah perubahan iklim yang ekstrim dan bencana-bencana lainnya, maka kita harus menghambat pemanasan global. Kekeringan, banjir, kebakaran hutan, serta badai yang setiap tahun semakin memburuk disebut-sebut berkaitan dengan pemanasan global (Foster, 2018). Produksi serta penggunaan minyak bumi secara berkelanjutan ini menandakan telah terjadi konflik dalam masyarakat seiring dengan perubahan iklim yang terjadi. Memahami peran penting minyak bumi bagi pemerintah, dan perannya dalam konflik internasional merupakan hal yang krusial dalam mengatasi tantangan perubahan iklim yang ada.

Menurut Joshua Busby (2006), minyak memenuhi sekitar 40% kebutuhan energi global dan akan terus memenuhi kebutuhan tersebut hingga 2030. Minyak masih dianggap sebagai bahan bakar transportasi yang efisien dengan kepadatan energi yang tinggi, mudah, dan relatif aman untuk diangkut dengan kendaraan. Beberapa analis dan pakar energi juga berpendapat bahwa dalam satu dekade ke depan, mereka memprediksi bahwa kita akan mencapai puncak produksi minyak, dimana lebih dari setengah cadangan minyak dunia akan diekstraksi dari bumi.

Konsumsi minyak diperkirakan akan meningkat hingga 57% secara global dari tahun 2000 hingga 2025. Di tahun 2025, diperkirakan konsumsi minyak akan mencapai 119 juta barrel per hari, meningkat sekitar 77 juta barrel per hari dari tahun 2001. Meningkatnya konsumsi bahan bakar di Asia menjadi salah satu penyebab peningkatan tersebut, selain itu Amerika Serikat juga menyumbang sekitar 20% dari pertumbuhan tersebut yang diperkirakan akan meningkat hingga 44% antara tahun 2000 hingga 2025 (Busby, 2006). Nyatanya, menurut Energy Information Administration 2023 (EIA), di tahun 2022 sendiri konsumsi minyak bumi global mencapai sekitar 97,6 juta barrel per hari dan kemungkinan dapat meningkat di tahun-tahun yang akan datang.

Dari segi produksi minyak mentah, terdapat tiga negara utama penghasil minyak terbesar di dunia yaitu Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Rusia. Ketiga negara ini menjadi pusat dari politik minyak dunia. OPEC yang menjadi pemegang 80% cadangan minyak bumi terbesar di dunia memiliki pengaruh yang kuat karena wewenangnya untuk menetapkan target produksi bagi negara anggotanya (Ismira et al., 2022). Keputusan produksi minyak yang diambil oleh Arab Saudi sebagai

salah satu anggota penting OPEC seringkali mencerminkan tujuan geopolitik yang lebih luas dalam menyikapi hubungannya dengan Amerika Serikat dan negara-negara kawasan Eropa.

Minyak ini dapat berperan sebagai pemicu konflik internasional, dimana sebagian besar perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia dimiliki oleh pemerintah sehingga kepentingan politik dan minyak sangat sulit untuk dipisahkan. Mereka cenderung memanfaatkan minyak sebagai alat diplomasi maupun senjata politik (Djelantik, 2010). Masalah-masalah geopolitik yang ditimbulkan dapat mempengaruhi harga minyak, terutama di negara-negara produsen. Harga minyak dipengaruhi oleh sistem penawaran dan permintaan. Jika pasokan minyak yang ada lebih besar daripada permintaan pasar, harga akan turun, tetapi jika pasokan minyak yang ada lebih sedikit dibanding permintaan pasar, harga akan naik. Contohnya, situasi di Timur Tengah, yang dikenal sebagai produsen minyak mentah terbesar di dunia, yang sering mengalami konflik geopolitik. Hal tersebut kemudian berdampak pada jumlah pasokan dan harga minyak dunia; hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga yang cepat dan penurunan harga yang tiba-tiba (EIA, 2021).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Tiongkok merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi minyak bumi terbesar di dunia dan merupakan pembeli utama minyak mentah Arab Saudi. Hubungan ekonomi kedua negara ini juga semakin erat karena berbagai kerja sama energi yang mereka lakukan. Tiongkok yang memerlukan minyak untuk pembangunan negaranya dapat berujung pada ketergantungan pasokan minyak Arab Saudi. Arab Saudi diperkirakan

menjadi negara utama pengeksport minyak ke Tiongkok setelah kunjungan Presiden Xi Jinping ke Riyadh yang membahas transaksi mereka kedepannya yang akan menggunakan mata uang Yuan (Reuters, 2023).

Tiongkok yang berusaha menjaga hubungan baik dengan Arab Saudi demi mengamankan pasokan minyak yang stabil selama pergolakan geopolitik di Timur Tengah. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui komitmen Tiongkok untuk mendukung Arab Saudi dalam berbagai kesempatan, salah satunya yaitu Saudi Vision 2030. Saudi Vision 2030 merupakan strategi ekonomi Arab Saudi yang bertujuan mengalihkan fokus perekonomiannya agar tidak bergantung sepenuhnya pada minyak. Secara umum, Saudi Vision 2030 ini merupakan visi jangka panjang yang bertujuan untuk menciptakan reformasi dan perubahan yang signifikan di berbagai aspek kehidupan di Arab Saudi. Rencana ini merupakan bentuk komitmen Arab Saudi dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang juga didukung secara penuh oleh Tiongkok (Saudi Chinese Business Council, 2023).

Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya memiliki cadangan minyak yang terbesar di dunia, sehingga kawasan ini cenderung menjadi pemasok utama energi bagi berbagai negara di dunia, khususnya Asia dan Eropa. Ketergantungan negara-negara tersebut pada minyak Timur Tengah membuat stabilitas kawasan ini sangat penting demi keamanan energi global. Hal ini tentu saja dimanfaatkan oleh negara-negara kawasan ini sebagai alat diplomasi untuk membangun aliansi strategis maupun mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Contohnya, Arab Saudi yang memanfaatkan produksi dan harga minyak untuk mempertahankan hubungannya dengan Tiongkok dan Amerika Serikat.

Konsep *The Politics of Oil* ini dapat membantu penulis untuk memahami peran minyak sebagai faktor penting dalam hubungan internasional antara negara-negara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, keputusan Arab Saudi untuk mengurangi produksi minyaknya dapat dipahami sebagai strategi politik untuk mempengaruhi pasar minyak global dan mendukung kepentingan politik negara tersebut. Perjanjian minyak antara Arab Saudi dan Tiongkok juga dapat mencerminkan pergeseran kekuatan politik dalam pasar minyak global.

C. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama merupakan sebuah hubungan yang terikat yang stabil dan sah secara Hukum, contohnya hubungan kerja sama dalam organisasi maupun lembaga internasional. Kolaborasi ini dapat terjadi akibat adanya perubahan reaksi menurut aktor dan adanya antisipasi sebagai bentuk tanggapan terhadap opsi yang diberikan oleh aktor lainnya. Negosiasi merupakan cara terbaik untuk bekerja sama. Selain itu, komitmen pribadi untuk mencapai kesejahteraan umum atau upaya untuk memenuhi kebutuhan pribadi menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya hubungan kerja sama. Selama aktor-aktor yang terlibat menganggap pihak lainnya sebagai mitra yang menguntungkan, maka hubungan yang kooperatif dapat tercapai. Teori kerja sama merupakan perwujudan dari kepentingan pribadi, dimana hal tersebut dapat dicapai melalui kerja sama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya yaitu dengan berusaha memenuhi kepentingan pribadi dengan bereksperimen sendiri atau bersama untuk bersaing (Putri, 2019).

Robert Keohane menyatakan bahwa kerja sama dapat terjadi ketika aktor dari dua negara atau non-negara menyesuaikan sikap dan tindakan mereka untuk

merespon keputusan dan tindakan pihak lain. Kerja sama ini kemudian diantisipasi melalui proses koordinasi kebijakan. Terdapat dua komponen penting dalam kerja sama, yaitu perilaku setiap aktor yang diorientasikan pada tujuan bersama dan kerja sama tersebut bersifat menguntungkan bagi setiap pihak yang terlibat. Keohane menganggap bahwa adanya kebijakan para aktor yang memfasilitasi pencapaian tujuan lainnya serta minimnya tindakan yang saling merugikan dapat menciptakan harmoni dalam hubungan antar negara (Bakry, 2017).

Selain itu, kerja sama antarnegara biasanya semakin meningkat dan dapat berujung pada kondisi saling ketergantungan. Menurut David Mitrany dalam buku *The Functional Theory of Politics*, semakin intens suatu hubungan kerja sama antarnegara di bidang tertentu, maka akan berpotensi menimbulkan *spill over effect* yaitu adanya peluang kerja sama di bidang fungsional lainnya seperti perdagangan, sumber daya alam, energi, dan sebagainya. Dalam kondisi tersebut, sebuah proses saling ketergantungan antarnegara mulai terbentuk yang nantinya akan mendorong dan memperluas lingkup kerja sama mereka. (Hadiwinata, 2017).

Kerja sama bilateral merupakan hubungan kerja sama antara 2 pihak, sehingga terdapat dua unit yang bertindak sebagai Negara. Hal tersebut dapat dilihat melalui ketergantungan satu negara dengan negara yang lainnya. Tanpa adanya hubungan tersebut, salah satu dari negara ini tidak dapat bertahan. Menurut Kusumo Hamidjojo, kerja sama bilateral yaitu hubungan kerja sama antarnegara yang tidak dibatasi oleh batasan geografis, demi mencapai tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Amalia, 2018).

Juwondo menyatakan bahwa kerja sama bilateral yang dipimpin oleh satu negara merupakan suatu hal yang fundamental karena kerja sama bilateral merupakan interaksi antara dua negara yang diolah dan semakin bertumbuh dengan saling menghormati hak masing-masing untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan sebagai negara berbangsa yang tidak mengabaikan ataupun mengisolasi keberadaan negara lain dan berusaha mewujudkan perdamaian dunia melalui hubungan bilateral. Kerja sama bilateral memiliki lingkup luas, diantaranya yaitu politik, ekonomi, budaya-masyarakat, pertahanan, dan keamanan (Amalia, 2018).

Kerja sama bilateral juga dapat menjadi sarana penyelesaian masalah yang terjadi antara dua negara. Masing-masing negara memiliki kepentingan pribadi sehingga kerja sama bilateral yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kerja sama bilateral ini memiliki peran penting dalam hubungan bernegara, dimana satu negara meminta bantuan pada negara lainnya karena sejatinya negara tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Hal tersebut juga menjadi faktor pendorong negara-negara untuk melaksanakan kerja sama internasional. Adanya tujuan dan kepentingan bersama dalam sebuah kerja sama bilateral menjadi suatu hal yang penting untuk menghindari konflik-konflik yang dapat terjadi (Denimah, 2021).

Menurut KJ Holsti, hubungan bilateral dapat terbentuk karena terdapat suatu konflik dalam interaksi. Konflik inilah yang menjadi faktor keberlangsungan hubungan yang tidak hanya berfokus pada persaingan saja. Konflik ini biasanya disebabkan oleh adanya persaingan dalam mencapai tujuan tertentu seperti ekspansi wilayah, keamanan, aliansi, penggulingan pemerintah negara musuh, perubahan

prosedur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan lain sebagainya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga ataupun mencapai tujuan, perintah, ataupun aktivitas tersebut yang nantinya akan bertentangan dengan kepentingan atau tujuan negara lain (Saputra, 2016).

Menurut Holsti, terdapat berbagai jenis faktor yang harus dipertimbangkan ketika menjalin kerja sama bilateral, diantaranya (Holsti & Azhari, 1988) yaitu :

- a. Kualitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh suatu negara
- b. Kemampuan untuk mengolah kualitas tersebut dan menggunakan kapabilitasnya untuk mencapai kepentingan nasionalnya
- c. Adanya ancaman, gangguan, dan hambatan
- d. Tingkat kebutuhan dan ketergantungan
- e. Respon dari pembuat keputusan

Kerja sama ekonomi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kedua negara yang terlibat untuk mencapai kepentingan nasional sekaligus memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Manda dan Nicolescu melihat kerja sama bilateral sebagai hubungan antara dua negara yang memiliki tujuan pembangunan lokal bersama, dimana otoritas eksekutif menjadi aktor utama dalam hubungan tersebut. Bentuk hubungan ini menyesuaikan dengan upaya pemecahan masalah yang terjadi di tingkat nasional masing-masing negara, seperti pelayanan publik, kesehatan, manajemen wilayah, dan lainnya, dimana pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengubah dan menetapkan proses kerja sama mereka. Kerja sama ini kemudian dilaksanakan demi memecahkan masalah kepentingan bersama, yang biasanya ditangani melalui pertukaran pengetahuan dan informasi, pertukaran

keterampilan dan pengalaman, pertukaran ahli, konsultasi teknis, penyelenggaraan lokakarya, dan lain sebagainya (Minca, 2015).

Di sisi lain, pola perilaku dan reaksi dalam kerja sama bilateral ini merupakan proses yang bermanfaat bagi kedua negara yang saling bekerja sama yaitu (Perwita & Yani, 2005):

- a. Rangsangan kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
- b. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
- c. Respon atau reaksi timbal balik dari negara penerima.
- d. Persepsi atau reaksi dari pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.

Konsep kerja sama bilateral dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis hubungan kerja sama antara Arab Saudi dan Tiongkok dalam konteks perjanjian minyak *China-Saudi Oil Deal Agreement*. Dengan mendekatkan hubungan dengan Tiongkok, Arab Saudi dapat mengurangi ketergantungannya terhadap Amerika Serikat sebagai partner kerja sama utama. Hal ini juga dapat memperkuat hubungan politik kedua negara dan membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas di masa depan. Kerja sama yang dijalin oleh kedua negara ini tidak lepas dari kebijakan dari masing-masing negara terkait pembangunan yang sejalan, yaitu Arab Saudi dengan Saudi Vision 2030 dan Tiongkok dengan BRI. Atas dasar tersebut, kedua negara menjalin kerja sama dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang dimiliki oleh masing-masing negara seperti kapabilitas dan kualitas mereka sehingga kedua negara dapat mencapai tujuannya masing-masing.

Melalui Saudi Vision 2030, Arab Saudi menjalin kerja sama dengan Tiongkok untuk membantu pembangunan dan pengelolaan berbagai proyek infrastruktur Arab Saudi. Sementara itu, Tiongkok menjalin kerja sama dengan Arab Saudi dengan maksud untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yaitu dengan menyukseskan program BRI di Timur Tengah yang dapat menciptakan berbagai peluang kerja sama yang besar bagi kedua negara, khususnya membuka jalan untuk Tiongkok agar dapat meningkatkan *power* di kawasan tersebut.